KEBIJAKAN INDONESIA MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN NEGARA-NEGARA KAWASAN PASIFIK (TUVALU, NAURU, KIRIBATI)

Oleh:
Arif satriawan
(Arifsatriawan.arifsatriawan@yahoo.com)
Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, MA
Bibliografi : 3 Jurnal dan/atau Working Papers, 15 Buku, 18 Dokumen dan Laporan Resmi, 28 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to understand why Indonesia Foreign Policy Open The Diplomatic Relations With Pacific Region Countries (Tuvalu, Nauru, Kiribati). Indonesian relations with countries in the world has existed since Indonesi has not been established. Ranging from bilateral relations to multirateral Indonesia also complement current international relations. Foreign policy based on national interests. Indonesia have the goals and interests to cooperate with the countries of the Pacific region. Thus researcher question is why Indonesia Foreign Policy Open The Diplomatic Relations With Pacific Region Countries (Tuvalu, Nauru, Kiribati).

This research theoretically has built with realism perspectives on International Relations and supported by Foreign Policy theory K.J. Holsty. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.

Researcher has formulated answered-hypothesis whic reveals the fact that Indonesia opened diplomatic relations with countries in the Pacific region based on national interests of Indonesia is to realize Indonesia who want to become a maritime country. Indonesia is the largest archipelago in the world with abundant marine wealth.

Keywords : ***Foreign Policy, Indonesia, Pacific Region, Maritime country***

I. Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang telah membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara. hal ini termasuk untuk negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Pasifik Selatan yaitu Tuvalu, Nauru, dan Kiribati. Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai motivasi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara kawasan pasifik tersebut.

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan amanat dari pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945, dan terus mengalami proses reinterpretasi dari masa ke masa tanpa kehilangan konsistensinya. Elaksanaan politik luar negeri bebas aktif memahami bahwa dunia bukanah ranah yang vakum, melainkan sebuah arena yang kompleks dan dinamis. Menyadari hal itu, refleksi ini akan mencoba menyoroti politik luar negeri RI dalam tiga kancah percaturan gobal yang dihadapi, yaitu perjuangan dekolonisasi, bipolarisasi Barat-Timur, dan Front Utara-Selatan, sebelum akhirnya memproyeksikan pada perkembangan terkini.

Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga dapat dimaknai sebagai prinsip dasar negara dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Untuk itu, sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, negara Indonesia tidak memeiliki batasan untuk bekerjasama serta menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang dianggap sebagai mitra sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia menjadikan doktirn "bebas aktif" sebagai akte kelahiran sebuah prinsip polugri yang berangkat dari situasi global saat itu. Di antara manfaat utama doktrin dan prinsip polugri tersebut yang masih relevan hingga kini ialah untuk menjaga persatuan Indonesia didalam negeri, sikap sahabat dengan negara-negara lain,dan mencintai perdamaian dunia. Akan tetapi, berdasarkan dinamika yang terbaca dari landscape politik internasional dari masa ke masa, doktrin tersebut sebenarnya tidak berjalan statis, akan tetapi terus memperbarui diri di setiap era.

Hubungan luar negeri Indonesia tentunya mengedepankan dan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Melalui hubungan diplomatik dengan berbagai negara dan meningkatkan kerjasama yang sejalan dengan kepentingan tersebut dapat membuktikan kemajuan politik luar negeri yang tidak hanya sekedar prinsip akan tetapi telah memasuki kepada implementasi yang nyata. Saat ini Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 186 Negara dari 193 negara anggota PBB, dimana pada tahun 2010 sebelumnya DPR RI telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pada tahun 2011 telah dilakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sembilan negara, yaitu Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, Antigua dan Barbuda, serta Bhutan. Kemudian dilanjutkan di tahun 2012 Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Botswana, Tuvalu, Haiti, dan Nauru. Serta di tahun 2013 Indonesia juga membuka hubungan dengan negara Kiribati. Beberapa negara yang dituju menjadi tujuan pembukaan hubungan diplomatik merupakan negara-negara yang berada di kawasan kepulauan Pasifik.

Keduabelas negara kepulauan di Pasifik tersebut berada dalam tiga subkawasan, yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, dan masing-masing memiliki karakter geografi dan penduduk yang beragam. Total penduduk di negara-negara kepulauan Pasifik hanya sekitar 9,6 juta jiwa, namun tersebar di wilayah perairan samudera yang sangat luas. Bank Dunia memperkirakan bahwa luas negara-negara kepulauan di Pasifik mencakup 15 persen luas permukaan bumi, belum termasuk Papua Nugini dan Nauru maupun belasan wilayah/teritori non-negara yang ada di Pasifik.

Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus tersendiri bagi Indonesia, yaitu sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan. Ini merupakan manfaat yang tentunya dapat dirasakan bersama oleh Indonesia dan negara-

negara di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan dan perekonomian yang berkembang, Indonesia relatif memiliki beberapa kesamaan dalam hal tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti misalnya keterbatasan lahan dan sumber daya alam, sensitifitas terhadap gejolak ekonomi dunia, maupun kerawanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Tidak kalah pentingnya, masyarakat Pasifik memiliki kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara.

Kawasan Kepulauan Pasifik merupakan bagian negara-negara yang tersusun atas pulau pulau kecil yang menyebar di kawasan samudra pasiik. Hal ini juga termasuk negara Indonesia, maka dari itu Indonesia termasuk pada organisasi Asia-Pasifik. Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan merupakan negara-negara kepulauan yang tersebari dikawasan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara yang berada dikawasan lalu lintas perdagangan jalur laut dunia.

Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya.

Wacana tentang Indonesia yang ingin menjadikan negaranya sebagai "poros maritim" sudah ada sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden-Presiden sebelum Presiden Jokowi. Agenda tersebut merupakan pekerjaan yang sulit direalisasikan mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim tersebut. Pemimpin-pemimpin Indonesia sendiri ingin mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dimasa lampau ditambah faktor kekayaan kelautan Indonesia dan sebagai negara kepulauan terbesar yang harus dimanfaatkan. Dengan bergantinya Presiden, tujuan Indonesia untuk menjadikannya sebagai negara poros maritim kemudian dilanjutkan ke generasi pemerintahan selanjutnya.

Saat ini "Poros Maritim" sudah menjadi agenda besar salah satu Presiden baru Keinginan Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut diapresiasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, potensi sumber daya alam yang besar dan letaknya yang strategis (berada di persilangan dua samudra Hindia dan Pasifik), memang sudah seharusnya menjadi poros maritim. Untuk menuju ke arah sana, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia, diantaranya adalah dengan terlebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi. Saat ini Indonesia baru berstatus sebagai negara kepulauan, setelah berlakunya UNCLOS 1982, dan sedang berupaya menjadi negara maritim.

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut Indonesia juga melakukan berbagai kerjasama dan membuka peluang dalam mempererat hubungan antar negara yang berada di satu kawasan Asia-Pasifik tersebut seperti kerjasama dan membuka hubungan diplomatik.

Pasifik Selatan juga merupakan wilayah strategis bagi Indonesia. Selain kerja sama yang telah berjalan selama ini, Indonesia akan mengembangkan kerja sama baru, seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga serta budaya. Untuk mendukung program pembangu- nan kapasitas ini, Indonesia berkomitmen menyediakan dana sebesar US$ 20 juta kepada negara-negara di Pasifik selama kurun waktu 2015-2019.

Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim sudah ada sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mengembalikan kejayaan dan masa keemasan Indonesia menguasai jalur laut di kawasannya. Indonesia yang diapit dua samudra Hindia dan Samudra menjadikan posisi strategis Indonesia untuk menjadi negara poros maritim di kawasan Asia-Pasifik.

Saat ini Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menuju agenda tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan Indonesia yang tengah memperluas ikatan hingga ke negara-negara kepulauan Pasifik Selatan yang tersebar di Samudra Pasifik melalui kerjasama dan pembukaan hubungan diplomatik pada beberapa negara.

Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dan akan menggunakan posisi strategis diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat. Kerjasama dan hubungan diplomatik tersebut beberapa diantaranya merupakan negara-negara yang berada di kawasan Kepulauan Pasifik.

Kerjasama Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan sudah mencapai 12 negara sehingga Indonesia kini telah menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan semua negara di kawasan pasifik Selatan sehingga keinginan Indonesia meningkatkan dan mempereat hubungan luar negeri serta kerjasama antar negara yang sejalan dengan kepentingan Indonesia.

Dari penjelasan penulisan diatas, menimbulkan pertanyaan penelitian bagi penulis yaitu ***"Mengapa Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik (Tuvalu, Nauru, Dan Kiribati)?"***

Kerangka Teori

Kerangka dasar diperlukan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat sebagai analisa terhadap penelitian. Pada kerangka teori, akan dibahas mengenai Perspektif, Tingkat Analisa, Konsep, dan teori sehinnga menunjang penelitian untuk menjawab hipotesa penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian.

Penulis menggunakan Perspektif Realis, dimana hubungan Internasional ditandai dengan anarkisme, dimana segala cara akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Hans J Morgenthau menyatakan bahwa *Super Power* adalah fokus utama hubungan internasional, *Power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional[1]. Perspektif Realis memiliki asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi yang kedua ialah dari pendekatan politik dan keamanan dengan cara menilai fungsi dan kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga ialah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.[2]

Dalam Penelitian untuk menentukan Tingkat analisa maka diperlukan Level analisa yang tepat yang akan membantu memahami objek permasalahan. Sebelum menentukan level analisa, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan unit analisis dan kedua unit eksplanasi. Unit analisis merupakan variabel dependen yang hendak dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi merupakan variabel independen yang perilakunya hendak diamati. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan Indonesia terhadap Malaysia dalam kasus klaim wilayah dan unit eksplanasi adalah penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian kasus dengan kebijakan Indonesia. Menurut Mohtar Mas'oed ada lima kategori menentukan level/tingkat analisa dalam studi hubungan internasional, yakni: Perilaku Individu, Perilaku Kelompok, Negara-Bangsa, Sistem Internasional.[3]

Tingkat Analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah Negara. Penelitian ini menggunakan level analisa negara-bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuasaan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang

---

[1] Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace. 1973.* New York: Knopf. Hlm 25

[2] *Ibid.,*

[3] Mohtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1994). Hal 42-44

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala gejala kekuasaan di dalam masyarakat.[4]sehingga ketika sebuah negara untuk dapat berinteraksi dengan aktor lain harus mendapat pengakuan secara de-facto dan de jure. Dalam hal ini yang bertugas sebagai pembuat kebijakan ialah negara yang berdaulat adalah Indonesia yang membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Teori adalah suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional sehingga mampu membuat konseprualisasi dan konseptualisasi peristiwa peristiwa di masa lalu hingga masa kini. Teori berperan membekali peneliti untuk membangun interpretasi terhadap permasalahan yang kompleks dan memberikan cara untuk berpikir kritis, logis, dan integratif.[5]

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan politik luar negeri**,** interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politk luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan perwujudan dari kepentingan nasional sebuah negara.

Secara umum, politik luar negeri (*Foreign Policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional[6]. Politik luar negeri ialah suatu kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, dan arah serta sasaran mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.[7]

Seperti hal nya strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dilakukan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan[8]. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[9]

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan **Teori Politik Luar Negeri** yang dikemukakan oleh K.J.Holsty. asumsi dasar nya politik luar negeri merupakan kebijaksanaan, sikap ataupun tindakan negara merupakan *output* politik luar negeri, *output* tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi perubahan dalam lingkungan internasional.[10] Dengan demikian, politik luar negeri dibentuk oleh suatu negara menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang, waktu, baik yang dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional.

---

[4] Miriam Budiardjo. *Dasar Dasar ilmu Politik.* Jakarta; gramedia pustaka, 2008. Hal 91

[5] Scott Burchill, Andrew Linklater. Teori Teori Hubungan Internasional. Bandung; Nusa Media. 2008. hal 19

[6] Anak Agung Banyu Perwira & Yanyang Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan internasional.* Remaja Rosdakary, Bandung. 2005. Hal 35

[7] Perwira dan Yani, *Pengantar Hubungan internasional,* PT Remaja Rosddakarya, Bandung. 2005. Hal 47

[8] K.J. Holsti, *Politik Internasional: kerangka analisis pedoman ilmu,* Jakarta, 1987, hal 88

[9] Jack C. Plano. Roy Olton, *"Kamus Hubungan Internasional"* Cetakan kedua, Penerbit Putra A Bardin, cv 1999. Hal 5-6

[10] K.J. Holsty. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa,* terj. Wara Juanda. Bandung: Bina Cipta. 1987, hal 131

Menurut K.J Holsti kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan untuk mempertahankan tujuan kondisi dan praktek yang berlangsung di lingkungan luarnya (eksternal). Namun kebijakan luar negeri dapat juga dibuat untuk mengubah kondisi di lingkungan luar demi keuntungan mereka sendiri, sebagian besar direncanakan untuk mempromosikan tujuan-tujuan domestik mereka, karena pada dasarnya proses pencarian keamanan, kesejahteraan, otonomi dan hal-hal yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah dari dari kebutuhan domestik.[11]

Konteks eksternal kebijakan luar negeri suatu negara adalah seluruh kondisi akan kebijakan-kebijaan dari negara lain yang memiliki dampak terhadap pilihan-pilihan kebijakan negara tersebut. Sedangkan konteks domestik adalah kondisi atau pertimbangan dalam negeri suatu negara yang mempengaruhi pilihan- pilihan kebijakan luar negeri negara bersangkutan.

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara meliputi :

1. *Structure of System* (Struktur dari sistem)
2. *Structure of World Economic* (Struktur ekonomi dunia)
3. *Purpose and actions of other actor* (tujuan-tujuan dan tindakan aktor lain)

Sedangkam faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara meliputi:

1. *National Attributes* (Atribut Nasional)
2. *Goverment Structure/ Philosophy* (Struktur pemerintahan/ filosopi)
3. *Geographical and Topoghraphic Caracteristic* (Karakteristik geografi dan topografi)

Politik luar negeri suatu negara merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang dicapai diluar batas yuridiksinya.[12] Dengan demikian, jika kita kaitkan teori politik luar negeri diatas dengan kasus Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik ialah karena beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan oleh K.J. Holsty ialah melalui faktor internal negara Indonesia seperti faktor geografi dan topografi dimana Indonesia ingin menjadikan negara nya sebagai poros maritim bagi jalur perdagangan dunia yang melewati kawasan Asia-Pasifik.

II. Isi

Sejarah Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Kawasan Pasifik

Hubungan Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasifik telah berlangsung lama dan terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Indonesia pertama kali membuka hubungan diplomatik di kawasan ini dengan Fiji yaitu pada 1974, dan terakhir dengan Kiribati pada 2013. Dengan demikian Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan seluruh negara kepulauan di Pasifik yang terdiri dari 12 negara, yaitu: Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.[13]

Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus tersendiri bagi Indonesia, yaitu sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan. Ini merupakan manfaat yang tentunya dapat dirasakan bersama oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan dan perekonomian yang berkembang, Indonesia relatif memiliki beberapa kesamaan dalam hal tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti misalnya keterbatasan lahan dan sumber daya alam, sensitifitas terhadap gejolak ekonomi dunia, maupun kerawanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Tidak kalah pentingnya, masyarakat Pasifik memiliki

[11] *Ibid.,*

[12] Andik Purwanto.DE.A, *Strategi Global Super Power Dalam Era Perang Dingin- Sebuah Pengantar.* Surakarta; Sebelas University Press. 1994. Hal 19

[13] *Peningkatan hubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik,* dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/209-diplomasi-februari-2015/1834-peningkatan-hubungan-dengan-negara-negara-kepulauan-pasifik.html diakses pada 18 Februari 2016 Pukul. 12:30 Wib

kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara.[14]

Keterikatan Indonesia dan kawasan Pasifik yang terjalin erat dibuktikan dengan beberapa organisasi dan forum regional yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Adapun beberapa organisasi tersebut seperti Asia-Pasifik, PIF, dan MSG.

Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik di negara-negara Pasifik

Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus tersendiri bagi Indonesia, yaitu sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan. Ini merupakan manfaat yang tentunya dapat dirasakan bersama oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan dan perekonomian yang berkembang, Indonesia relatif memiliki beberapa kesamaan dalam hal tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti misalnya keterbatasan lahan dan sumber daya alam, sensitifitas terhadap gejolak ekonomi dunia, maupun kerawanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Tidak kalah pentingnya, masyarakat Pasifik memiliki kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara.[15]

Peningkatan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik melalui upaya sharing of best practices juga terus dilakukan, khususnya dalam bidang-bidang yang diminati seperti pertanian, perikanan, pendidikan, demokrasi, good governance, dan penanggulangan bencana. Sejak berdirinya Direktorat Kerja Sama Teknik di Kementerian Luar Negeri RI pada 2006, tercatat sebanyak 500 peserta dari negara-negara di Pasifik Selatan telah berpartisipasi pada berbagai program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Indonesia. Bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah RI kepada negara-negara kepulauan di Pasifik, diantaranya adalah beasiswa pendidikan serta hibah peralatan pertanian dan kepolisian.[16]

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2015, Menlu Retno L.P. Marsudi telah menyampaikan bahwa kawasan Pasifik Selatan dianggap sebagai wilayah yang strategis, dimana Indonesia telah berkontribusi aktif pada berbagai forum di kawasan (MSG, PIDF, PIF, SwPD) dan ke depannya akan mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang yang diminati bersama, seperti demokrasi, perikanan, pemuda dan olahraga, dan seni budaya. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam kerja sama peningkatan kapasitas untuk negara-negara di Pasifik senilai USD 20 juta selama periode 2015-2019.[17]

Oleh karena itu, ke depannya masih banyak terdapat hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan dialog dan partisipasi konstruktif Indonesia dengan negara-negara di kepulauan Pasifik, baik pada tataran bilateral, regional, maupun pada kerja sama dan saling dukung pada organisasi internasional. Kegiatan-kegiatan seperti saling kunjung pejabat senior dan konsultasi bilateral, partisipasi pada forum sidang dan kegiatan regional, maupun misi muhibah dan pertukaran people-to-people contacts akan semakin mendekatkan Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik pada cita-cita bersama untuk stabilitas, kemakmuran, hubungan bertetangga baik, dan pergaulan yang saling menghormati di kawasan Asia-Pasifik.[18]

Selain Indonesia yang sudah tergabung dalam beberapa organisasi dengan negara-negara dikawasan Pasifik, Indonesia juga menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara-negara yang berada di kawasan yang sama tersebut. adapun negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik lebih dahulu dengan Indonesia adalah negara

[14] *Ibid.,*
[15] *Ibid.,*
[16] *Meningkatkan Diplomasi Ekonomi di Kawasan Pasifik,* dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/210-4-articles-februari-2015/1835-meningkatkan-diplomasi-ekonomi-di-kawasan-pasifik.html diakses pada 23 Februari Pukul 10:00 Wib
[17] *Ibid.,*
[18] *Ibid.,*

Kepulauan Marshall, Selandia Baru, Vanuatu, Palau, dan lain-lainnya.

Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik tahun 2012 – 2013 dengan Kawasan Pasifik

Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Negara Nauru

Republik Nauru, atau sebelumnya dikenal dengan nama Pleasant Island, adalah negara berbentuk republik terkecil di dunia. Negara ini tidak memiliki ibukota resmi. Nauru terkenal dengan hasil produksi fosfatnya yang telah ditambang oleh gabungan perusahaan asing sejak 90 tahun terakhir. Tetangga terdekat Nauru adalah Kepulauan Banaba, Kiribati. Dengan 9.378 penduduk, Nauru adalah negara dengan penduduk paling sedikit kedua setelah Vatikan.[19]

Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Nauru sebagai salah satu negara Pasifik. Hubungan ini diperuntukan memperluas kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk perubahan iklim, pengendalian bencana, perekonomian, perdagangan serta kerjasama Selatan-Selatan.[20] Pembukaan hubungan diplomatik ini secara resmi dilakukan melalui penandatanganan Komunike Bersama oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya dan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta besar Marlene Moses, di Gedung PTRI New York pada Jumat, 21 Desember 2012.[21]

Dubes Moses menyatakan kegembiraannya atas dibukannya hubungan diplomatik kedua negara, terutama mengingat bahwa Indonesia telah menjadi sahabat bagi negara-negara Pasifik. Selain itu, Dubes Indonesia mengatakan bahwa selama ini kedua negara telah berinteraksi dan bekerjasama dalam sejumlah isu di forum PBB dan forum internasional lainnya sehingga pembukaan hubungan diplomatik ini, maka semakin terbuka luas kesempatan bagi kedua negara untuk memperkuat dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang.[22] Pembukaan hubungan diplomatik dengan Nauru merupakan penjabaran dari komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas negara-negara di Pasifik dalam meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan bagi kemajuan dan kemakmuran.

Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Negara Tuvalu

Tuvalu yang pada awalnya dikenal sebagai Kepulauan Ellice adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Tuvalu juga merupakan negara tetangga Kiribati dan Nauru. Tuvalu memiliki jumlah penduduk kurang lebih 10 ribu jiwa yang membuatnya menjadi negara berdaulat ketiga terpadat didunia dibandingkan dengan Vatikan dan Nauru yang memiliki penduduk yang lebih sedikit. Luas daratan Tuvalu hanya sekitar 26 km persegi sehingga menjadikan Tuvalu sebagai negara terkecil keempat didunia. Tuvalu merupakan salah satu negara anggota *Commonwealth* sehingga kemerdekaannya pun merupakan hasil pemberian Inggris pada 01 Oktober 1978. Bentuk negara merupakan Monarki Konstitusional.[23]

Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Tuvalu sebelumnya sesuai dengan persetujuan DPR RI yang menyetujui pembukaan hubungan diplomatik untuk 21 negara termasuk 3 negara pasifik, salah satu negara tersebut ialah Tuvalu. Walaupun Tuvalu merupakan negara yang kecil namun, untuk satu negara yang memiliki hak suara yang sama di PBB harus tetap diperhitungkan.

Indonesia menjalin hubungan dengan Tuvalu merupakan sebuah negara di Kepulauan Pasifik. Pembukaan hubungan diplomatik ini

[19] *National Report on population ad housing,* dalam http://www.spc.int/prism/nauru/PublicDocuments/Census/Nauru_2011_Census_Report_FINAL.pdf diakses pada 23 Februari 2016 Pukul. 14:20 Wib

[20] *RI – Nauru buka hubungan diplomatik,* dalam http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/12/12/24/mfih7a-rinauru-buka-hubungan-diplomatik berita online tanggal 24 Desember 2012, diakses pada 23 Februari 2016 Pukul. 20:08 Wib

[21] *Ibid.,*

[22] *Ibid.,*

[23] *Ministry of Education and Sports, and Ministry of Finance and Economic Development from the Government of Tuvalu; and the United Nations System in the Pacific Islands*. April 2013. Dalam http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/MDG%20Acceleration%20Framework/MAF%20Reports/RBAP/MAF%20Tuvalu-FINAL-%20April%204.pdf Diakses tanggal 24 Februari 20166 Pukul. 20:20 Wib

dapat membuka banyak potensi bagi Indonesia. Kerjasama kedua negara resmikan pada sela-sela Rapat PBB 1 Oktober 2012 lalu dan pejabat tinggi masing-masing negara menandatangani dokumen-dokumennya. Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menjelaskan peresmian hubungan diplomatik ini dapat berlanjut dengan plan action karena Tuvalu merupakan salah satu negara kepulauan.[24]

Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Negara Kiribati

Kiribati merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik yang sebelumnya bernama Pulau Gilberts. Sejarahnya Kiribati dihuni sebuah kelompok etnis Mikronesia yang bertuturkan suatu jenis bahasa Oseanik yang sama selama 2.000 tahun sebelum mengadakan hubungan dengan orang-orang Eropa. Pulau-pulau tersebut dinamakan Kepulauan Gilbert pada tahun 1820 oleh seorang admiral Estonia, Adam von Krusenstern, dan kapten berkebangsaan Perancis, Louis Duperrey; berasal dari nama Thomas Gilbert, yang menyeberangi kepulauan ini pada tahun 1788. Pada tahun 1892, Kepulauan Gilbert menjadi sebuah protektorat Britania Raya bersama dengan Kepulauan Ellice yang berdekatan. Keduanya kemudian menjadi koloni pada tahun 1916 dan akhirnya menjadi daerah otonomi pada tahun 1971. Pada tahun 1943, Pertempuran Tarawa berlangsung di ibu kota Kiribati di pulau Tarawa.[25]

Pada tahun 1978, Kepulauan Ellice menjadi negara merdeka bernama Tuvalu, dan Kiribati pun ikut merdeka pada 12 Juli 1979. Setelah kemerdekaan Kiribati, Amerika Serikat menarik segala klaim terhadap Pulau Phoenix dan semua pulau-pulau di Kepulauan Line (kecuali tiga pulau) yang kemudian menjadi wilayah Kiribati.[26]

Kiribati hanya mempunyai sedikit sumber daya alam. Cadangan fosfat yang bernilai komersial telah habis saat Kiribati merdeka. Kopra dan ikan kini merupakan hasil produksi dan ekspor yang dominan. Ekonomi Kiribati telah naik-turun dengan besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ekonomi dihalangi kurangnya pekerja berkeahlian tinggi, infrastruktur yang lemah, dan letaknya yang jauh dari pasar dunia. Pariwisata menyumbangkan lebih dari seperlima produk domestik bruto Kiribati. Dana bantuan keuangan internasional, kebanyakan dari Britania Raya dan Jepang, merupakan tambahan yang penting bagi PDB-nya, setara dengan 25%-50% PDB dalam beberapa tahun terakhir.[27]

Langkah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Kiribati diresmikan dalam dalam penandatanganan Pembukaan Hubungan Diplomatik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kiribati. Penandatanganan di wkilkan oleh pejabat masing masing negara yang dibuat di Natadola, Fiji pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2013.[28]

Indonesia ingin mewujudkan sebagai negara poros maritim

Potensi Indonesia untuk Menjadi Negara Poros Maritim

Dalam sejarah maritim Asia, jalur yang ditempuh pedagang China, Jalur Sutra, terdiri dari darat dan laut. Jalur darat mempunyai rute yang melalui China, Asia Tengah, India, dan Asia Barat. Jalur laut merupakan kelanjutan dari jalur darat yang dimulai dari Teluk Persia sampai Laut Merah. Selain itu, jalur laut juga dapat ditempuh dari Teluk Benggala sampai ke Teluk Persia.[29]

---

[24] *Around The World: Indonesia, Tuvaluto Establish Diplomatic Ties,* dalam http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/around-world-indonesia-tuvalu-establish-diplomatic-ties.html diakses pada 24 Februari 2016 Pukul. 22:10 Wib

[25] *My Micronesia: Kiribati,* dalam http://www.mymicronesia.com/kiribati/ diakses pada 24 Februari 2016 Pukul. 23:20 Wib

[26] *Ibid.,*

[27] *Ibid.,*

[28] Dokumen Resmi "Komunike Bersama Tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik Antara Pemerintah Republik Indonesia
Dan Pemerintah Republik Kiribati", dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4643_KIR-2013-0001.pdf diakses pada 25 Februari 2016 Pukul. 14:00 Wib

[29] Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Indonesia merupakan negara maritim dan sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan laut yang penting sejak masa prasejarah, khususnya di Selat Malaka. Namun, hubungan perdagangan Nusantara dengan China dan India baru dimulai pada abad ke-3 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dari Fa-Hsien, yang berlayar dari India ke China melalui Jawa.[30]

Walaupun Indonesia merupakan negara maritim sejak masa prasejarah, pemanfaatan potensi ekonomi laut masih belum maksimal karena pemerintah tidak terlalu serius menggarap sektor kelautan dan perikanan.[31] Pembangunan dan ekonomi Indonesia masih berbasis pada eksplorasi dan pengolahan wilayah daratan, padahal perairan Indonesia lebih luas dan potensial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.[32] Potensi menjadi negara poros maritim dunia dapat dilihat dari Indonesia yang berada di daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional.[33]

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya "*The Influence of Sea Power upon History*" mengemukakan teori bahwa *sea power* merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.[34]

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.[35]

Telah diketahui bahwa dalam sejarah bahwa wilayah Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan antar negara. Hal ini menunjukan adanya kekuatan maritim Indonesia yang besar pada zaman dahulu. pada masa pembentukan negara Indonesia hingga Indonesia dipimpin oleh presiden pertama RI Soekarno konsep pembangunan kekuatan maritim hanya sebuah gagasan. Gagasan tersebut belum dapat direalisasikan pada masa pemerintahannya karena fokus pemerintahan untuk membangun negara. namun, konsep ini sudah menjadi dasar untuk kebijakan saat ini. Kemudian presiden seelanjutnya lebih bersifat pembangunan wilayah darat karna perhatian Presiden Soeharto berfokus pada permasalahan pertanian dan pangan. Era pemerintahan Habibie tidak menunjukkan kebijakan tertentu untuk pengelolaan lahan. Reformasi yang baru

[30] *Ibid.,* hal 5

[31] Aziz, Munawir. (2014). "Tantangan Poros Maritim Jokowi" dalam Harian Suara Merdeka, 18 Oktober 2014.

[32] *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,* dalam http://www.presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html diakses pada 26 Februari 2016 Pukul. 15:30 Wib

[33] *Ibid.,*

[34] *Potensi Indonesia Sebagai Negara maritim,* dalam http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim diakses pada 26 Februari 2016 Pukul. 16: 00 Wib

[35] *Ibid.,*

saja bergulir dan kondisi domestik yang belum stabil serta permasalahan Timor Timur membuat pengelolaan lahan menjadi terabaikan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), dibentuk Departemen Maritim, yang saat ini disebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembentukan departemen ini menunjukkan bahwa Gusdur mempunyai perhatian khusus di bidang maritim. Sementara itu, era pemerintahan Megawati tidak menunjukkan kemajuan yang berarti mengenai dalam bidang maritim.[36]

Era pemerintahan SBY mengangkat isu maritim sebagai bagian dari kebijakannya. Namun, perhatian terhadap isu maritim sudah tertuang dalam MP3EI. Strategi pengembangan potensi maritim juga sudah dimuat di dalam MP3EI yang dibentuk pada tahun 2011.[37] Tidak ada keraguan mengenai prestasi Presiden SBY dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Peran aktif Indonesia di ASEAN dalam 10 tahun ini telah mengembalikan kepemimpinan Indonesia di organisasi regional itu. Kepiawaian diplomasi Indonesia juga menonjol dalam keanggotaan aktif pada berbagai forum, seperti G7, APEC, MDGs, dan forum multilateral lainnya. Pengakuan itu juga diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah dan ketua dari forum-forum multilateral itu.

Warisan SBY dalam politik luar negeri juga berkaitan dengan inisiatif dalam menyelenggarakan berbagai forum internasional. Tujuan utama forum itu adalah untuk promosi demokrasi (termasuk kompatibilitas antara demokrasi dan Islam), pluralisme/multikulturalisme masyarakat, dialog antar-agama (interfaith), dan resolusi konflik damai sebagai modalitas utama politik luar negeri Indonesia. Bali Democracy Forum merupakan contoh nyata inisiatif global Indonesia untuk membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia.

Kebijakan luar negeri SBY yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satunya adalah membangun blue economy dalam rangka konektivitas maritim APEC. Gagasan itu disampaikan SBY di Brasil, Juni 2012 sebagai inisiatif untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Konsep Blue Economy ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 mencantumkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional untuk mencapai Visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Salah satu misi tersebut adalah "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". Selanjutnya, melalui visi dan misi tersebut menetapkan beberapa kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, terukur dan realistik, efektif, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu kebijakan utama-nya adalah "Kebijakan Kelautan Indonesia untuk pemanfaatan potensi kelautan dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui kebijakan kebudayaan kelautan (ocean culture policy), kebijakan tata kelola kelautan (ocean governance policy), kebijakan keamanan maritime (maritime security policy), kebijakan ekonomi kelautan (ocean economic policy), dan kebijakan lingkungan laut (marine environment policy), guna mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional"[38] Dalam politik luar negeri SBY, kerjasama dan kemitraan itu penting maka dari itu, untuk memmbangun konsep kemaritiman ini yang berbasis pada kerjasama dan kemitraan dengan berbagai

[36] Erlinda Matondang, *Analisis Kebijakan Poros Maritim Dunia Dalam Konteks Peningkatan Konektivitas Nasional Dan Regional,* Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia, 2014. Dalam https://ndaerlinda.files.com/2015/01/analisis-kebijakan-poros-maritim-dunia-dalam-konteks-peningkatan-konektivitas-nasional-dan-regional.docx diakses pada 26 Februari 2016 Pukul. 22:10 Wib

[37] *Ibid.,*

[38] *Analisis Perbandingan Kebijakan Mengenai Peraturan Atau Undang-Undang Yang Dikeluarkan Pemerintah Pada Pembanguna Sektor Maritim Di Masa Pemerintahan Soekarno, Soeharto-Habibie, Gusdur-Mega, Dan SBY,* dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/strategi_peningkatan_indeks_pembangunan_manusia.pdf diakses pada 26 Febbruari 2016 Pukul. 23:10 Wib

negara sehingga akan mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Karena Indonesia Menguatkan Eksistensi Indonesia di Kawasan Pasifik dan Membangun Kerjasama Kemaritiman antar negara

Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, Indonesia merupakan bangsa berjiwa bahari yang memiliki filosofi "hidup dengan dan dari laut". Pemerintah dan bangsa Indonesia membuat satu kebijakan yang strategis dan antisipatif yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri. Kebijakan ini perlu ditindak lanjuti dengan penepatan kebijakan dan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan.

Indonesia sebagai maritim dilakukan dengan Pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah maritime yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti bahwa Negara mampu mencapai ketahanan nasional secara mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk menjadi negara yang mengandalkan wilayah perairan sebagai langkah besarnya. Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan dan tindakan yang berasal dari dalam negeri saja, akan tetapi dukungan baik dari negara-negara maupun organisasi-organisasi regional dan internasional turut menjadi perhitungan dalam rangka pencapaian kepentingan tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan demikian negara yang terdiri dari ribuan pulau serta memiliki perbandingan wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Begitu juga dengan negara-negara yang berada di perairan samudra Pasifik merupakan negara-negara kecil yang terdiri dari negara kepulauan. Dengan demikian antara Indonesia dan negara-negara kawasan pasifik lainnya ialah tidak jauh berbeda disamping negara-negara tersebut merupakan sama-sama negara kepulauan. Hal ini menunjukan jika kesamaan Indonesia dalam bidang kemaritiman dapat membuahkan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

Sejak awal Pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno mengatakan bahwa Indonesia ingin dijadikan sebagai negara yang membangkitkan kejayaan maritim nya kembali seperti pada zaman-zaman kerajaan dahulu kala. Hal ini juga yang menjadi dasar kebijakan-kebijakan pemimpin setelahnya untuk melanjutkan pembangunan sektor kemaritiman ini.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono istilah pembangunan sektor kemaritiman atau kelautan sudah di kembangkan pada saat beliau memimpin. Beberapa langkah dan kebijakan yang mengarah pembangunan kemaritiman selama dua periode sudah berangsur-angsur terlaksana seperti pembangunan- pembangunan infrastruktur dan yang paling penting yaitu pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga kepulauan Pasifik. Pembukaan hubungan tersebut berdasar atas kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Posisi strategis Nauru, Kiribati, dan Tuvalu yang berada di wilayah Pasifik Selatan semakin menguatkan eksistensi Indonesia di kawasan Pasifik yang merupakan salah satu jalur perdagangan juga. Nauru, Kiribati dan Tuvalu merupakan tiga dari beberapa negara yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia di kawasan Pasifik. Dengan membuka hubungan diplomatik dengan tiga negara tersebut dan juga menyusul negara-negara Pasifik lainnya, Indonesia saat ini dapat dikatakan dapat menjaga hubungan antar negara dengan membangun kerjasama dibidang kemaritiman dan kelautan terhadap negara-negara tersebut.

III. Simpulan

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga dapat dimaknai sebagai prinsip dasar negara dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Untuk itu, sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, negara Indonesia tidak memeiliki batasan untuk bekerjasama serta menjalin hubungan dengan

negara-negara lain yang dianggap sebagai mitra sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia menjadikan doktirn "bebas aktif" sebagai akte kelahiran sebuah prinsip polugri yang berangkat dari situasi global saat itu.

Hubungan luar negeri Indonesia tentunya mengedepankan dan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Melalui hubungan diplomatik dengan berbagai negara dan meningkatkan kerjasama yang sejalan dengan kepentingan tersebut dapat membuktikan kemajuan politik luar negeri yang tidak hanya sekedar prinsip akan tetapi telah memasuki kepada implementasi yang nyata. Saat ini Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 186 Negara dari 193 negara anggota PBB, dimana pada tahun 2010 sebelumnya DPR RI telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB termasuk 3 negara dari kawasan Pasifik.

Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus tersendiri bagi Indonesia, yaitu sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan. Ini merupakan manfaat yang tentunya dapat dirasakan bersama oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan dan perekonomian yang berkembang, Indonesia relatif memiliki beberapa kesamaan dalam hal tantangan pembangunan yang dihadapi. Tidak dapat dipungkiri, pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara kemaritiman dan kelautan merupakan kepentingan Indonesia sebagai kelanjutan untuk menjadi negara poros maritim.

Negara Poros Maritim berarti negara tersebut merupakan negara yang memanfaatkan sumber daya kelautan dari segala sisi sebagai pembangunan negara walaupun negara tersebut bukanlah negara kepulauan. Wacana tentang Indonesia yang ingin menjadikan negaranya sebagai "poros maritim" sudah ada sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden-Presiden sebelum Presiden Jokowi. Agenda tersebut merupakan pekerjaan yang sulit direalisasikan mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim tersebut.

Dengan demikian, Indonesia yang bertetangga dan berada pada satu kawasan yang sama yaitu berada di Samudra Pasifik terhadap beberapa negara Pasifik tersebut sehingga sangatlah wajar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut walaupun negara tersebut adalah negara kecil. Hubungan Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasifik telah berlangsung lama dan terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Indonesia pertama kali membuka hubungan diplomatik di kawasan ini dengan Fiji yaitu pada 1974, dan terakhir dengan Kiribati pada 2013. Dengan demikian Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan seluruh negara kepulauan di Pasifik yang terdiri dari 12 negara, yaitu: Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Dan beberapa negara lagi setelah tahun 2013 yang menjadikan hubungan diplomatik dengan berbagai negara kawasan pasifik sudah mencapai lebih dari 12 negara. Dan juga keterikatan Indonesia dan kawasan Pasifik yang terjalin erat dibuktikan dengan beberapa organisasi dan forum regional yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Adapun beberapa organisasi tersebut seperti Asia-Pasifik, PIF, dan MSG.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Potensi menjadi negara poros maritim dunia dapat dilihat dari Indonesia yang berada di daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti

prosedur internasional. Selain itu Indonesia potensi Indonesia juga dapat dilihat dari geostrategic wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar. Tentunya banyak sekali kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari potensi-potensi ini. Kekayaan sumber daya kelautan dari hasil-hasil kelautan, pariwisata, sumber-sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui merupakan pelengkap yang membuat potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maritim.

Untuk menjadi negara yang mengandalkan wilayah perairan sebagai langkah besarnya. Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan dan tindakan yang berasal dari dalam negeri saja, akan tetapi dukungan baik dari negara-negara maupun organisasi-organisasi regional dan internasional turut menjadi perhitungan dalam rangka pencapaian kepentingan tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan demikian negara yang terdiri dari ribuan pulau serta memiliki perbandingan wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Begitu juga dengan negara-negara yang berada di perairan samudra Pasifik merupakan negara-negara kecil yang terdiri dari negara kepulauan. Dengan demikian antara Indonesia dan negara-negara kawasan pasifik lainnya ialah tidak jauh berbeda disamping negara-negara tersebut merupakan sama-sama negara kepulauan. Hal ini menunjukan jika kesamaan Indonesia dalam bidang kemaritiman dapat membuahkan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono istilah pembangunan sektor kemaritiman atau kelautan sudah di kembangkan pada saat beliau memimpin. Beberapa langkah dan kebijakan yang mengarah pembangunan kemaritiman selama dua periode sudah berangsur-angsur terlaksana seperti pembangunan- pembangunan infrastruktur dan yang paling penting yaitu pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga kepulauan Pasifik. Pembukaan hubungan tersebut berdasar atas kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Posisi strategis Nauru, Kiribati, dan Tuvalu yang berada di wilayah Pasifik Selatan semakin menguatkan eksistensi Indonesia di kawasan Pasifik yang merupakan salah satu jalur perdagangan juga. Nauru, Kiribati dan Tuvalu merupakan tiga dari beberapa negara yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia di kawasan Pasifik. Dengan membuka hubungan diplomatik dengan tiga negara tersebut dan juga menyusul negara-negara Pasifik lainnya, Indonesia saat ini dapat dikatakan dapat menjaga hubungan antar negara dengan membangun kerjasama dibidang kemaritiman dan kelautan terhadap negara-negara tersebut.

Referensi

Jurnal

Jurnal Prof.Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, Ms, *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad Xxi,* diunduh dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf. Diakses pada 1 Maret 2016 Pukul. 12:00 Wib

Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A., *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, diunduh dalam http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/41124/mhn130209.pdf. diakses pada 1 Maret 2016 Pukul. 16:40 Wib

Soemadi D.M Brotodiningrat,*Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi,* Jurnal Diplomasi Vol. 4 No.1, Maret 2012 ISSN: 2085-6075

Buku

Anak Agung Banyu Perwira & Yanyang Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan internasional.* Remaja Rosdakary; Bandung

Andik Purwanto.DE.A, 1994. *Strategi Global Super Power Dalam Era Perang Dingin- Sebuah Pengantar.* Surakarta; Sebelas University Press.

Ernest Satow, 1957. *A Guide to Diplomatice Practice*, London, Longmans & Company

Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace. 1973.* New York: Knopf.

Jack C. Plano. Roy Olton, 1999. *"Kamus Hubungan Internasional"* Cetakan kedua, Penerbit Putra A Bardin

K.J. Holsty. 1987. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa,* terj. Wara Juanda. Bandung: Bina Cipta.

K.J. Holsti, 1987. *Politik Internasional: kerangka analisis pedoman ilmu,* Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2011. *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Lexy J. Moleong, 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya,

Marsetio. 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar ilmu Politik.* Jakarta; gramedia pustaka.

Mohtar Mas'oed, 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES

Perwira dan Yani, 2005. *Pengantar Hubungan internasional,* PT Remaja Rosddakarya, Bandung.

Scott Burchill, Andrew Linklater. 2008. Teori Teori Hubungan Internasional. Bandung; Nusa Media.

Internet

Amich Allumi, "Biaya Ekonomi, Sosial, Politik Perang Irak" dalam http://www.prakarsarakyat.org/artikel/artikel_cetak.php?aid=26996 diakses 01 Maret 2015

Around The World: Indonesia, Tuvaluto Establish Diplomatic Ties, dalam http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/around-world-indonesia-tuvalu-establish-diplomatic-ties.html diakses pada 24 Februari 2016 Pukul. 22:10 Wib

Dokumen Resmi "Komunike Bersama Tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kiribati", dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4643_KIR-2013-0001.pdf diakses pada 25 Februari 2016 Pukul. 14:00 Wib

Geografi Indonesia, dalam http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia diakses pada 08 Mei 2015 Pukul 07:28

Indonesia-Nauru Buka Hubungan DIplomatik, dalam http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=294#.VlFJyHYrK00 diakses pada 22 November 2015 Pukul. 13:00 Wib

Indonesia jadi Produsen hasil laut terbesar, dalam http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/ekonomi/10/12/10/151367-tahun-2015-indonesia-jadi-produsen-hasil-laut-terbesar, diakses pada 4 Februari 2016 Pukul. 13:09 Wib

Industri Maritim Butuh Kebijakan Kuat, dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/10025/Industri-Maritim-Butuh-Kebijakan-Kuat diakses pada 26 Februari 2016 Pukul. 23:00 Wib

Maps of Nauru, dalam http://www.infoplease.com/atlas/country/nauru.html diakes pada 20 Februari 2016 Pukul. 14:07 Wib

My Micronesia: Kiribati, dalam http://www.mymicronesia.com/kiribati/ diakses pada 24 Februari 2016 Pukul. 23:20 Wib

Nauru Profiles, dalam http://www.infoplease.com/country/nauru.html diakses pada 20 Februari 2016 Pukul. 13:08 Wib